

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi peran Inspektorat dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota Kupang, disimpulkan bahwa:

1. Dalam menjalankan tugasnya Inspektorat Daerah Kota Kupang telah melaksanakan tugasnya secara optimal, namun dalam pelaksanaan program tahunan kadang mengalami kendala khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam Pelaksanaan tugasnya sehingga program pengawasan tidak semuanya dapat ditindaklanjuti dalam satu tahun masa anggaran. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kota Kupang antara lain:
 - a. Intervensi Anggaran
 - b. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Kapasitas Pengawasan
 - d. Adanya Inkoordinasi dan Ego Sektor Antara Perangkat Daerah

6.2 Saran

1. Perlu adanya penambahan jumlah SDM atau tenaga pengawas yang sesuai dengan kebutuhan Organisasi. Inspektorat Kota Kupang perlu membuat analisis kebutuhan pegawai baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan, kemudian berkoordinasi dengan BKD sebagai instansi

yang berperan dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di daerah.

2. Inspektorat Daerah Kota Kupang harus lebih banyak koordinasi antar lembaga atau perangkat daerah sehingga tidak terjadinyaa inkoordinasi antar perangkat daerah sehingga pelaksanaan peran Inspektorat tidak terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK Memberikan Opini WTP untuk LKPD TA 2020 Pemerintah Provinsi NTT
<https://ntt.bpk.go.id/bpk-memberikan-opini-wtp-untuk-lkpd-ta-2020-pemerintah-provinsi-ntt/>
- Dwi Prastowo dan Rifka Julianti. 2005. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi Edisi Kedua*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- Fauzi, Harryr, Raditya, 2014. *Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai pengawasan Internal dalam pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan*, Bengkulu: Universitas Bengkulu
<http://repository.unib.ac.id/8872/2/I%20CII%20CIII%20CII-14-har.FH.pdf>
- Hermin. 2019. *Efektivitas Pengawasan Keuangan pada Inspektorat Kota Makasar*, Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6326-Full_Text.pdf
- Halim Abdul, Kusufy Muhamad Syam. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, Hani T. 2001. *Manajemen Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE
- Musa. 2017. *Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) DI Inspektorat Kota Gorontalo*, Makasar: Universitas Negeri Gorontalo
<http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2016-2-2-61201-931412061-bab1-30032017110113.pdf>
- Irmayanti Sireger. 2019. *Kewenangan Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan batu Selatan*, Medan: Universitas Muhamadya Sumatera Utara
<http://repository.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/1826>
- Muh. Hary Mappangara. 2018. *Analisis pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*, Sulawesi Maros Selatan: Universitas Hasanuddin Makasar
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTA1MTkzYzlhNzU1YzJjNDM5ZDcyMmUzZjNmODI1YWJmMDBhMjAwMA==.pdf
- Muhamad Rustan. 2014. *Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Inspektorat Pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Makasar*, Makasar: Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6440/1/Muhammad%20Rustan_opt.pdf

- Pengertian Pengawasan Internal Menurut Para Ahli
<https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-pustaka-1-pengertian-dan-tujuan-pengawasan-i.html>
- Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Para Ahli
<http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/4373/3/BAB%20II.pdf>
- Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip)
<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/peran-inspektorat-daerah-sebagai-aparat-pengawas-internal-pemerintah-apip-85>
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 *Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.*
- Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- Permendagri Nomor 23 tahun 2007, *Tentang Pejabat Pengawas pemerintah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT, dan Pejabat pengawas pemerintah dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 *Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89 tanggal 23 Juli 2007).*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung
- Terry, Geogre R. Dan Leslie W. Rue. 1992. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Akasara.
- Tugas, Fungsi dan Peran APIP sesuai Permendagri
<http://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/>

UU No. 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara.*

<http://info.diklat.org/diklat-bimtek-pertanggungjawaban-keuangan-daerah/>

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*